

## **Penawaran Jasa Hukum untuk Calon Kepala Daerah Pada Pemilihan 2024 Kantor Advokat/Konsultan Hukum Ruhermansyah dan Rekan**

Sebagai mantan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat periode 2013-2018 dan 2018-2023, saya, Ruhermansyah, S.H., C.Med., Advokat/Konsultan Hukum memiliki pengalaman mendalam dan keahlian khusus dalam bidang pemilu dan pemilihan. Dalam kontestasi pemilihan 2024, selain menjadi ajang kontestasi politik, Pemilihan juga sarat dengan berbagai potensi kerawanan, mulai dari pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilihan (politik uang), kode etik pemilihan oleh penyelenggara pemilu hingga penyalahgunaan kekuasaan. Semua ini dapat mempengaruhi hasil akhir dan strategi pemenangan termasuk legitimasi kemenangan.

Kerawanan pemilu atau pemilihan ini menjadikan peran advokat sangat krusial dalam memberikan perlindungan hukum, nasehat hukum dan tindakan hukum yang tepat bagi para klien calon kepala daerah. Kantor Advokat/Konsultan Hukum Ruhermansyah dan Rekan siap mendampingi Anda dalam setiap tahap proses pemilihan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta memberikan pembelaan maksimal jika terjadi sengketa atau masalah hukum lainnya seperti:

Berikut adalah peran advokasi hukum oleh advokat atau konsultan hukum dalam menangani kerawanan sengketa hukum selama pemilu atau pemilihan:

### 1. Pelanggaran Administrasi Pemilihan

- Konsultasi Hukum dan Audit Kepatuhan: Advokat dapat memberikan konsultasi hukum terkait prosedur administrasi pemilu untuk memastikan semua langkah telah sesuai dengan regulasi. Audit kepatuhan juga dapat dilakukan untuk mendeteksi dan mencegah potensi pelanggaran sebelum terjadi.

- Pendampingan dalam Proses Pelaporan: Jika pelanggaran terjadi, advokat dapat mendampingi calon atau tim kampanye dalam melaporkan kasus ini ke Bawaslu dan mendokumentasikan bukti-bukti yang kuat.

### 2. Tindak Pidana Pemilihan (Politik Uang)

- Pencegahan dan Edukasi: Advokat dapat memberikan penyuluhan hukum kepada calon dan tim kampanye mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari politik uang, serta strategi untuk mencegah pihak lain untuk melakukan praktik ini.

- Pembelaan di Pengadilan: Jika terjadi tuduhan terlibat politik uang atau perkara lainnya, advokat akan berperan dalam pembelaan hukum di pengadilan, membantah tuduhan tersebut dengan bukti-bukti yang sah.

### 3. Penyalahgunaan Kekuasaan

- Penegakan Hukum dan Pembelaan: Advokat dapat melakukan pendampingan hukum jika ada tuduhan penyalahgunaan kekuasaan oleh calon atau lawan politik. Mereka juga dapat melakukan gugatan hukum jika ada penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan Anda.

- Investigasi Internal: Melakukan investigasi internal untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan sumber daya negara yang bisa menjadi ancaman hukum bagi calon.

### 4. Manipulasi Hasil Pemilu

- Monitoring dan Verifikasi Hasil Pemilu: Advokat dapat mendampingi calon dalam memantau dan memverifikasi hasil pemilu untuk memastikan integritas penghitungan suara.
- Penyusunan Permohonan Sengketa: Jika terjadi manipulasi hasil, advokat akan menyusun dan mengajukan Permohonan Sengketa ke Mahkamah Konstitusi atau lembaga terkait, dengan menyediakan argumen hukum yang kuat dan bukti yang valid.

#### 5. Sengketa Proses (Penetapan Calon)

- Advokasi dalam Proses Penetapan: Advokat berperan dalam advokasi hukum saat terjadi sengketa penetapan calon, termasuk mengajukan keberatan atau banding jika calon klien merasa dirugikan oleh keputusan KPU atau Bawaslu.
- Pembelaan Hukum: Menyusun pembelaan hukum dan representasi di depan lembaga peradilan jika ada sengketa terkait pencalonan.

#### 6. Kampanye Hitam dan Disinformasi

- Pengaduan dan Litigasi: Advokat dapat membantu mengajukan pengaduan hukum terkait kampanye hitam atau disinformasi yang merugikan klien, serta membawa kasus ini ke pengadilan untuk meminta keadilan.
- Tindakan Hukum Preventif: Menyusun dan mengajukan permintaan kepada penyelenggara pemilu atau otoritas terkait untuk menghentikan kampanye hitam yang sedang berlangsung.

#### 7. Intimidasi dan Kekerasan

- Pelaporan dan Perlindungan Hukum: Advokat dapat membantu dalam melaporkan kasus intimidasi atau kekerasan kepada pihak berwenang dan memastikan klien mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.
- Penuntutan Hukum: Jika klien menjadi korban atau dituduh melakukan intimidasi, advokat akan mengambil langkah hukum yang diperlukan untuk penuntutan atau pembelaan.

#### 8. Sengketa Hasil Pemilu

- Persiapan dan Pengajuan Permohonan Sengketa: Advokat akan mempersiapkan dan mengajukan Permohonan atas sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi atau lembaga yang berwenang, dengan menyiapkan bukti dan argumen yang komprehensif.
- Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa: Dalam beberapa kasus, advokat juga dapat berperan dalam negosiasi untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui mediasi.

#### 9. Keterlibatan Pihak Asing

- Investigasi dan Pelaporan: Advokat dapat membantu dalam melakukan investigasi terkait keterlibatan pihak asing dalam pemilu dan melaporkannya ke otoritas yang relevan.
- Tindakan Hukum untuk Perlindungan Kedaulatan: Advokat akan melakukan tindakan hukum untuk melindungi kepentingan nasional dan klien dari pengaruh atau campur tangan asing yang tidak sah.

10. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu: Pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu merujuk pada tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan standar integritas, profesionalisme, dan netralitas yang diharapkan dari para penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Peran advokat dalam situasi-situasi di atas sangat penting untuk memastikan bahwa semua proses pemilu atau pemilihan berjalan sesuai dengan hukum, dan bahwa klien mereka mendapatkan perlindungan dan pembelaan yang maksimal di tengah potensi kerawanan tersebut.

Dengan keahlian kami dalam memahami regulasi pemilihan dan pengalaman panjang dalam pengawasan pemilu, dan link kerja nasional kami tidak hanya sekadar mendampingi, tetapi juga proaktif dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko hukum yang berpotensi mengancam keberhasilan kampanye, kerawanan-kerawanan sebagaimana disebutkan di atas khususnya pada: pemungutan dan penghitungan perolehan suara, Rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penyelesaian sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Peran kami adalah memastikan setiap langkah Anda terlindungi secara hukum, sehingga Anda dapat fokus pada strategi politik untuk mencapai kemenangan sebagaimana strategi yang telah Anda susun.

Pontianak, 30 Agustus 2024  
Hormat kami,

Ruhermansyah, S.H., C.Med.  
Advokat & Konsultan Hukum  
Kantor Ruhermansyah dan Rekan